

Reformasi Metodologi Pembangunan Nasional

Oleh: Novri Susan^{*}

SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan MJK (Muhammad Jusuf Kalla) telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tugas-tugas besar dan berat kedua pasangan tersebut sudah menanti. Salah satunya adalah menjawab masalah krisis multi dimesi dimulai pada awal tahun 1997. Krisis dan kesulitan menjawabnya, secara mendasar diakibatkan oleh tidak tepatnya pilihan metodologi pembangunan nasional, dari Orba (Orde Baru) sampai masa transisi ini. Sebagian ilmuwan sosial menyatakan bahwa krisis multidimensi berkaitan erat dengan metodologi pembangunan nasional.

Selama pemerintahan Orba metodologi pembangunan nasional mengacu pada aliran ilmu sosial positivistik yang melahirkan teori-teori modernisasi. Teori-teori modernisasi yang dikembangkan di dunia barat (Amerika) digunakan untuk menjawab persoalan perekonomian di Indonesia oleh Orba. Asumsi dasar yang dipegang oleh Orba adalah perekonomian harus Keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Barat kemudian dimanfaatkan oleh Orba sebagai *blue print* pembangunan melalui perencanaan-perencanaan terkendali. Metodologi pembangunan positivis ini kemudian hanya bisa dilaksanakan oleh Negara dan aparat birokrasinya yang mempunyai wewenang mengendalikan dan mengontrol proses pembangunan. Situasi ini melahirkan fenomena Negara pasti benar dan Rakyat pasti salah, karena hanya Negara dan aparat birokrasinya yang tahu apa dan bagaimana cara membangun. Sentralisme pada akhirnya menjadi

^{*} Dosen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga dan Peneliti Pusat Studi Politik dan Advokasi (PSPA).

dampak logis dari model pembangunan positivistik ini, dimana seluruh pembangunan terkunci di satu titik saja, yaitu Negara. Dampak dari itu semua salah satunya adalah terhapusnya tatanan lokal yang jauh sebelum model pembangunan itu dilaksanakan telah mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat.

Metodologi pembangunan positivis ini berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan hasil dari pembangunan itu diharapkan menyebar melalui hukum *trickle down effect* (hukum tetesan ke bawah). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin merata hasil ekonomi untuk rakyat, tapi kenyataannya berkebalikan. Pertumbuhan ekonomi pada masa Soeharto mencapai keberhasilan menakjubkan dengan tingkat inflasi yang rendah dan nilai rupiah yang stabil, akan tetapi ternyata kemiskinan masih merata dan dominan. Simbol keberhasilan pembangunan dalam bentuk gedung-gedung tinggi, kantor-kantor mewah, industrialisasi, dan eksploitasi alam ternyata tidak memberikan efek kesejahteraan pada rakyat secara merata. Pada gilirannya, perekonomian nasional tidak mampu menghadapi krisis ekonomi karena struktur ekonomi nasional tidak dibangun oleh kekuatan ekonomi merata melainkan elitis (parsial). Dampak lebih luas dari model pembangunan positivis itu adalah pecahnya konflik kekerasan komunal di beberapa daerah Indonesia sebagai sebab hancurnya tatanan lokal oleh pembangunan Negara. Sebagian kalangan intelektual meyakini bahwa fenomena ini adalah bentuk kegagalan metodologi pembangunan positivis, dimana krisis ekonomi, dan krisis-krisis pada dimensi lainnya, pada akhirnya belum juga terlampaui sampai dengan pemerintahan Megawati. Masa pemerintahan Megawati telah memulai dengan konsep otonomi daerah namun hal itu menjadi paradoks ketika masalah ekonomi makro masih dikejar dengan sistem pertumbuhan ekonomi tinggi.

Pemerintahan SBY perlu memperhatikan dengan serius persoalan metodologi pembangunan ini. Perlu dilaksanakan reformasi metodologis secara konsisten untuk segera keluar dari krisis. Pilihan yang sangat memungkinkan untuk menjawab itu semua adalah metodologi pembangunan kritis. Metodologi pembangunan kritis ini diinspirasi dari ilmu sosial kritis. Metodologi ini tidak serta merta membacakan dakwaan terhadap metodologi pembangunan selama ini. Metodologi pembangunan kritis berangkat dari konsep "*dialectic of potential and will*". Konsep ini mengacu pada suatu dialog antara perencanaan dan potensi lokal. Metodologi positivis mengharamkan konsep ini karena menganggap perencanaan yang diambil dari formulasi-formulasi teori modernisasi harus terlaksana tanpa interupsi dan koreksi sehingga dampaknya potensi lokal sama sekali terbungkam bahkan hancur.

Metodologi pembangunan kritis melakukan mediasi antara perencanaan (teori) dan potensi lokal. Pembangunan tidak lagi menjadi kepentingan ideologis penguasa melainkan suatu cara yang bijaksana mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan secara prinsipil tidak diorientasikan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata melainkan membangun kekuatan-kekuatan lokal pada segala dimensi melalui proses dialog. Negara pastilah benar dengan perencanaanya harus diganti dengan model dialog perencanaan. Sehingga yang benar adalah hasil dialog dari perencanaan Negara dengan kekuatan lokal. Dampak makro yang akan diperoleh dari model pembangunan ini adalah meratanya kekuatan lokal secara sosial ekonomi. Sehingga tidak perlu lagi dipikirkan pertumbuhan ekonomi secara membabi buta karena pertumbuhan ekonomi akan berjalan bersama dengan pemerataan ekonomi.

Selanjutnya agar SBY dan pemerintahannya bisa melaksanakan konsep *dialectic of potential and will* ini ada beberapa kunci pokok yang harus diperhatikan. *Pertama* pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi pemerataan kekuatan local pada segala dimensi, baik pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya. *Kedua* perencanaan Negara harus mengalami proses dialog dengan kekuatan lokal, sehingga menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. *Ketiga* Negara melalui aparat birokrasinya tidak lagi sebagai pengontrol, pengawas dan pengarah pembangunan melainkan sebagai fasilitator (fungsi fasilitasi). *Keempat* pelaksanaan otonomi daerah tidak merupakan penyerahan total tetapi merupakan proses terciptanya fungsi dialogis antara pusat dan daerah. *Kelima* pembangunan tidak lagi menjadi legitimasi Negara untuk mengontrol rakyat melainkan sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah. *Keenam*, evaluasi pembangunan harus terus dilaksanakan oleh rakyat dan Negara melalui suatu mediasi non kekuasaan sehingga pembangunan menemukan hasil yang positif untuk rakyat.

Keenam kunci pokok dalam melaksanakan pembangunan ini jika dapat dilaksanakan oleh pemerintahan SBY maka dalam waktu lima tahun kesejahteraan rakyat dapat segera diwujudkan. Pemecahan masalah perekonomian ini sesungguhnya tidak akan lepas dari paradigma atau metodologi pembangunan nasional yang akan dipakai oleh SBY dan pemerintahannya. Apakah masih tetap menggunakan metode pembangunan positivistik yang terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat sekaligus tidak mampu menjawab krisis multidensi, ataupun melakukan reformasi metodologi pembangunan. *Wallahu'alamu Bishawab!*